

EFEKTIVITAS SISTEM E-PLANNING DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Ferdiana Putriani

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
ferdiana.18089@mhs.unesa.ac.id

Eva Hany Fanida

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
evafanida@unesa.ac.id

Abstrak

Memberikan pelayanan publik yang baik merupakan tuntutan pemerintah, hal ini sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi. Salah satunya diwujudkan dengan menerapkan sistem *e-planning* yang merupakan wujud dari tata kelola yang baik melalui *e-governance*. BAPPEDA Kabupaten Tulungagung menerapkan sistem *E-Planning* yang sering disebut dengan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang memiliki fungsi dokumentasi, administrasi, serta pengolahan data pembangunan daerah sebagai informasi yang disampaikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, serta mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Tujuan adanya penelitian ini adalah mengetahui bagaimana efektivitas sistem *E-Planning* dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menganalisis tentang efektivitas sistem berdasarkan teori Aprilia, Wijaya, dan Suryadi (2014:130) yaitu mencakup peran website, peran pemerintah, tujuan, jangkauan akses, content, dan interaksi. Hasil penelitian diperoleh bahwa efektivitas sistem *E-Planning* atau SIPD dalam perencanaan pemerintahan daerah sudah efektif dilakukan di Bappeda Tulungagung meliputi informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Faktor pendukung yaitu semakin berkembangnya teknologi informasi yang pesat, sarana dan prasarana yang sudah memadai, dan adanya sosialisasi secara bertahap kepada Pemerintah Daerah. Faktor penghambat yaitu, sistem yang masih sederhana, dan bila ada eror harus menghubungi langsung Kemendagri.

Kata Kunci: Efektivitas, sistem *E-Planning*, *E-Government*

Abstract

Providing good public services is a public demand, things that are in line with the rapid development of science and communication technology. One of them is realized by implementing an e-planning system which is a manifestation of good governance through e-governance. BAPPEDA Tulungagung Regency implements an E-Planning system which is often referred to as the local government information system (SIPD). The Regional Government Information System (SIPD) is a system that has the functions of documentation, administration, and processing of regional development data as information to the public and decision-making material in planning, implementing, and developing regional government implementation. The purpose of this research is to find out how effective the E-Planning system is in regional development planning in Tulungagung Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This study analyzes the effectiveness of the system based on the theory of Aprilia, Wijaya, and Suryadi (2014: 130) which includes the role of the website, the role of government, goals, reach of access, content, and interaction. The results showed that the effectiveness of the E-Planning or SIPD system in regional development planning has been effectively carried out in the Tulungagung Bappeda including regional information and regional financial information. Supporting factors are the rapid development of information technology, adequate facilities and infrastructure, and the gradual socialization to local governments. The inhibiting factor, the system is still simple, and if there is an error, you must contact the Ministry of Home Affairs directly.

Keyword: Effectiveness, *E-Planning* system, *E-Government*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan kesempatan bagi pemerintah dalam mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi secara cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Sehubungan berlakunya UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kemungkinan yang ada semakin meningkat. Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban tersebut secara efisien dan efektif, organisasi pemerintah daerah harus mampu secara efektif dan efisien merumuskan kebijakan strategis dan operasional berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. *Good governance* merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang progresif dan bersih (Sedarmayanti, 2004). Hal ini akan menjadi acuan dalam pengembangan sistem informasi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah perlu memberikan pelayanan publik yang prima berdasarkan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan ilmu pengetahuan. Marshall McLuhan dalam bukunya *Understanding Media*, mengatakan bahwa media itu "*The Extension of Man*" menjelaskan media sebagai tangan kedua manusia. Media memiliki jangkauan yang memperluas berbagai hal dari manusia. Berbagai media juga digunakan pemerintah dari lingkup pemerintah pusat maupun daerah sebagai alat untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat. Penggunaan tersebut bertujuan untuk memberikan layanan yang baik dengan menerapkan *e-governance*. Pemakaian teknologi dan komunikasi untuk alat tata kelola yang lebih baik dapat diterapkan secara online dan berbasis web. Dalam pemerintahan digital, pemerintah menyediakan website dan berbagai aplikasi yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas (Fanida, Eva Hany & Fidianingsih, 2020).

Menurut Westlatt (2007), *e-government* menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan manajemen yang lebih efisien dan hemat biaya, mempromosikan layanan kepada masyarakat umum, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Rianto, dkk. (2012:36) *E-government* sampai pada kesimpulan adalah bentuk aplikasi pelaksanaan tugas negara dan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. *E-government* memberikan kesempatan dalam peningkatan dan pengoptimalan hubungan antar instansi pemerintah dan antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut Indrajit (2002:36), *e-government* adalah sistem hubungan baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya,

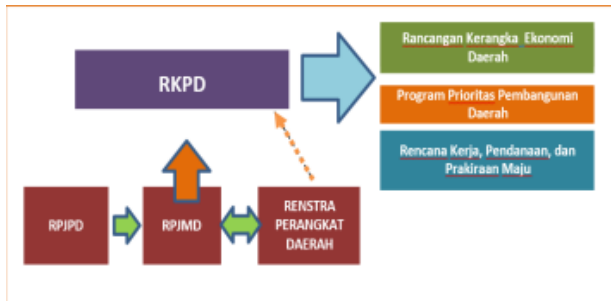
termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Dapat dikatakan bahwa *E-government* sebagai proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat operasi sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan interaktif.

Tujuan dari *e-government* adalah untuk membangun sistem pemerintahan yang tanggung jawab, transparan dan efektif yang dapat mengimbangi tuntutan transformasi sosial. Penggunaan *e-government* dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah. Selain itu, dapat memperluas partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

Berdasarkan jurnal penelitian terdahulu yang berjudul Efektivitas Penerapan Sistem E-planning Program Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar Tahun 2019 yaitu untuk beberapa permasalahan yang sering dihadapi SKPD dalam membuat perencanaan: aturan pembuatan dokumen perencanaan, dukungan data kinerja, dan kurangnya pengetahuan perencanaan di bidang penganggaran. Seperti kesulitan SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan oleh, tujuan program dan kegiatan tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam visi dan misi organisasi dokumen perencanaan strategis SKPD. Kesulitan dalam menganalisis relevansi. Isu lainnya adalah penyesuaian tahunan rencana tujuan rencana strategis. Ini sering melibatkan pertanyaan apakah perubahan atau penyesuaian diperlukan. Hal ini tentu menyulitkan penyusunan anggaran prioritas dalam hal efektivitas dan efisiensi anggaran. Untuk melakukan ini diperlukan sinkronisasi data, peninjauan, validasi, integrasi, dan pengembangan rencana tindakan alternatif untuk kecepatan dan akurasi untuk mencapai tujuan organisasi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Oleh karena itu Pemerintah menerapkan sistem inovasi teknologi berbasis elektronik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung. BAPPEDA menerapkan sistem *E-Planning* yang merupakan bentuk perwujudan *Good Governance* melalui *E-Governance* dimana sistem ini bertujuan agar dokumen perencanaan terselesaikan dengan mudah, cepat dan tepat. Sistem ini telah merevolusi proses Musrenbang dari Kabupaten, Kabupaten/Kota, Forum SKPD, Musrenbang RKPD, RKPD hingga KUA-PPAS menjadi lebih transparan, lebih cepat, lebih terintegrasi, lebih konsisten dan ditegakkan. Dokumentasi Aturan ini mengatur tentang langkah-langkah dan tata cara penyusunan, pengelolaan,

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Sistem *E-Planning* bertujuan memperbaiki hasil informasi perencanaan pembangunan yang dihasilkan. Tetapi pada penerapannya tentu tidak berjalan dengan mulus. Banyak permasalahan yang harus dihadapi dalam proses penerapannya.



Gambar 1. Penjabaran Dokumen RKPD Tahun 2021

(Sumber: RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2021)

Sistem *E-Planning* yang diterapkan Bappeda Tulungagung dinamakan SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. SIPD merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah (bappeda kaltim). Menurut Permendagri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terkait yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Dengan kata lain, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menjadi dasar pelaksanaan sinkronisasi antara rencana pembangunan dengan anggaran pembangunan daerah. Ditinjau dari manajemen strategis, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi manajemen (Yuwono dkk., 2008:67). Untuk pelaksanaannya dibuatlah aplikasi berbasis web yang dinamakan aplikasi SIPD. Dalam SIPD terdapat 3 ruang lingkup yaitu Informasi Pemerintahan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Setiap ruang lingkup memiliki fungsinya masing-masing.

Dasar hukum yang mendasari berdirinya SIPD ini diatur dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan Presiden diantaranya:

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 391 yaitu Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah dan Pasal 395 yaitu Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.
2. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem e-Government, Arsitektur SPBE Nasional, memberikan pedoman pelaksanaan proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan integrasi keamanan SPBE, membidik dan menciptakan layanan SPBE yang terintegrasi secara nasional.
3. Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pasal 2 yaitu Satu Data Indonesia merupakan acuan dan pedoman pelaksanaan kepada otoritas pusat dan daerah terkait dengan penyelenggaraan tata kelola data dalam memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, menyediakan evaluasi dan manajemen.

Perkembangan SIPD saat ini merupakan portal data dan informasi pembangunan daerah, menyajikan data berupa informasi pembangunan dan informasi kondisi pembangunan daerah, serta acuan dalam perencanaan wilayah dan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah. Peran SIPD dalam proses perencanaan daerah dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Peran SIPD dalam Perencanaan Pembangunan

(Sumber: Bappeda Provinsi Riau, 2017)

Adanya sistem perencanaan berbasis elektronik yang saat ini sedang dikembangkan di daerah untuk mencapai tujuan mengarahkan pembangunan dari yang terendah sampai yang tertinggi di semua tingkat pemerintahan, tergantung kebutuhan daerah sehingga rencana

pembangunan tidak diarahkan ke arah yang salah dan tidak akan menguntungkan pihak tertentu. Penting untuk diketahui bahwa cerminan sebenarnya dari pengembangan masyarakat adalah prediksi tentang apa yang benar-benar dibutuhkan penduduk setempat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup mereka dalam konteks bernegara. Berdasarkan uraian dan identifikasi permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas sisten *E-Planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Tulungagung?
2. Bagaimana faktor pendukung efektivitas sistem *E-Planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana faktor penghambat efektivitas sistem *E-Planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Kabupaten Tulungagung?

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas sistem *E-Planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis faktor pendukung efektivitas sistem *E-Planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Kabupaten Tulungagung
3. Untuk menganalisis faktor penghambat efektivitas sistem *E-Planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Kabupaten Tulungagung

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Sistem *E-Planning* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung”. Sehingga nantinya berguna untuk mengetahui bagaimana keefektivan sistem *e-planning* dalam memaksimalkan perencanaan pembangunan daerah.

METODE

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam pendahuluan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana pendapat Sugiyono (2014: 15) bahwa. Penelitian kualitatif memiliki landasan filsafat *post-positivisme* yang dipakai untuk meneliti pada kondisi objek natural, peneliti menjadi instrumen penting, penerapan teknik purposif sampling diterapkan pada pemilihan sampel sumber data. Pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi, analisis data secara induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian cenderung dalam penekanan makna (Sugiyono, 2014:15). Oleh karena itu, tujuan dipilihnya pendekatan ini yaitu untuk menguraikan secara deskriptif, menginterpretasikan rumusan masalah sebagai landasan pengambilan

kesimpulan tentang Efektivitas Sistem *E-Planning* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung. Di dalam metode penelitian kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian dengan mengumpulkan data berupa perkataan atau kata-kata, gambar dan bukan angka (Moleong, 2015). Begitu pula menurut Anggarwal (dalam Salaria, 2012) yaitu penelitian deskriptif digunakan untuk menemukan informasi tentang kondisi atau situasi dengan tujuan menguraikan dengan kata-kata yang mendetail secara jelas dan terperinci.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung, Jl. Ahmad Yani Timur No.37, Tamanan, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Lokasi tersebut dipilih karena Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tulungagung terdapat Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang ditunjuk untuk mengelola Website *E-Planning* ini.

Subjek dalam penelitian ini adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tulungagung. Subjek yang diteliti disini adalah :

1. Ibu Devi Ismawati, S.Kom selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pembangunan (Litbang) Bappeda Kabupaten Tulungagung sebagai pengkoordinir dan pengelola website
2. Staf Bidang Penelitian dan Pembangunan sebagai pengelola website
3. Ibu Novi selaku operator Kantor Kepala Desa Gedangsewu sebagai Perangkat Desa pengguna *E-Planning*

Fokus pada penelitian ini mengenai efektivitas sistem *E-Planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung yang akan dianalisis melalui Indikator Efektivitas *E-Government* (website) yang dikemukakan oleh Aprilia, Wijaya dan Suryadi (2014:130) yaitu :

1. Efektivitas Sistem *E-Planning* dalam Perencanaan Pembangunan daerah
 - a. Peran sistem (website) yang berisikan tahapan perkembangan *E-Government* yang terdiri dari :
 - 1) Tahap 1 *Emerging* (Kemunculan)
 - 2) Tahap 2 *Enhance* (Peningkatan)
 - 3) Tahap 3 *Interactive* (Interaktif)
 - 4) Tahap 4 *Transactional* (Transaksi)
 - 5) Tahap 5 *Connected* (Koneksi)
 - b. Peran Bappeda dalam penggunaan dan pengelolaan sistem (website)

- c. Tujuan adanya sistem *E-Planning* atau SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah
 - d. Jangkauan akses sistem *E-Planning* atau SIPD
 - e. *Content* (Konten) dalam website *e-planning* atau SIPD
 - f. Interaksi Bappeda dengan Perangkat pengguna sistem *E-Planning* atau SIPD
2. Faktor Pendukung Efektivitas Sistem *E-Planning* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Bappeda Kabupaten Tulungagung
 3. Faktor Penghambat Efektivitas Sistem *E-Planning* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Bappeda Kabupaten Tulungagung

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung dari informan kunci yang terkait dengan kegiatan yang diteliti. Menurut Irawan (2004), data primer dikumpulkan langsung dari sumber yang valid. Sumber daya ini dapat berupa objek, situs, atau orang. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber manusia melalui wawancara. Selain itu, metode wawancara menurut (Moleong, 2004) adalah suatu mode komunikasi dimana pewawancara dan responden melakukan percakapan tentang daftar pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

Menurut Irawan (2004), data sekunder adalah data tidak langsung dari sumber lain. Oleh karena itu, data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara menelaah suatu dokumen atau dengan mereview buku atau dokumen penting yang relevan dengan penelitian dan mendukung penelitian. Oleh karena itu, kualitas survei ini juga sangat bergantung pada kualitas dokumen yang disurvei. Hal ini dilakukan dengan menelaah laporan dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan penyidikan, seperti peraturan perundang-undangan, arsip, dan hasil Musrembang di Provinsi Tulungagung. Disamping itu penulis mencari data dan informasi melalui data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel-artikel di jurnal ilmiah, buletin statistik, laporan-laporan, publikasi pemerintah, informasi dari organisasi, hasil survei terdahulu, catatan-catatan publik mengenai peristiwa-peristiwa resmi serta catatan-catatan perpustakaan (Panjaitan, 2021). Diharapkan dengan metode pengumpulan data ini penulis dapat memperoleh data yang valid dan reliabel serta mewakili data yang dibutuhkan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011: 247). Analisis data ini berupa proses penghimpunan data, reduksi data, penyajian data, inferensi, atau validasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAPPEDA atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung merupakan badan yang mengelola perencanaan pembangunan daerah serta sebagai penyelenggaraan penelitian dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka pengembangan pembangunan secara umum. Sebagai penyelenggara perencanaan pembangunan daerah, Bappeda dituntut untuk selalu memberikan pelayanan perencanaan pembangunan yang transparan, efektif, efisien, tepat sasaran serta memperbaiki kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Tulungagung dengan menerapkan sistem *E-Government* yaitu *E-Planning* atau sering disebut SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yaitu suatu sistem yang berfungsi mendokumentasikan dan mengelola data pembangunan daerah, mengolahnya menjadi informasi yang tersedia untuk umum, dan menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Website ini termasuk dalam website resmi yang dikeluarkan oleh Kemendagri sesuai dengan aturan Kemendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem ini dapat diakses melalui website www.sipdkemendagri.go.id di google. Website ini sudah beroperasi di Bappeda Tulungagung sejak tahun 2020 hingga sekarang sehingga masih dalam proses penyesuaian. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka berikut hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu:

1. Efektivitas Sistem *E-Planning* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Suatu sistem yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat dikatakan efektif apabila telah adanya interaksi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya maupun masyarakat.

Efektivitas adalah tujuan, ukuran pencapaian tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya. Ketika tujuan atau sasaran yang direncanakan tercapai, itu efektif. Sebaliknya, jika maksud atau tujuannya tidak tepat, maka tidak efektif. Pedoman dan tujuan yang dikomunikasikan oleh pemerintah mengenai isi informasi yang terdapat di dalam website itu sendiri digunakan sebagai kriteria untuk mengukur efektifitas atau ketidakefektifannya.. Menurut Kurniawan (dalam Marlina, 2017) mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi tanpa adanya penekanan. Sedangkan menurut Sedarmayanti dalam (Marlina, 2017) efektivitas merupakan gambaran seberapa jauh

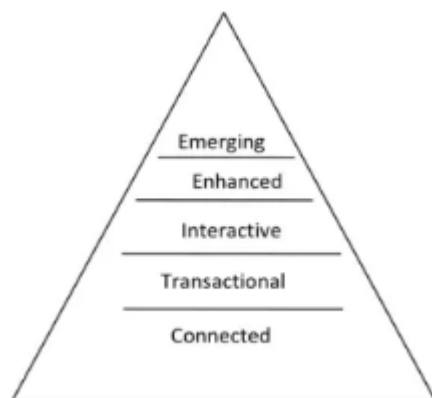
ketetapan target yang hendak dicapai biasanya lebih mengutamakan hasil dari pada masukan. Efektivitas dimaknai sebagai pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan (Panjaitan, 2021).

Suatu sistem e-governance dinilai efektif dipengaruhi oleh beberapa hal yang dikemukakan oleh Aprilia, Wijaya, dan Suryadi (2014:130), antara lain peran website, tujuan, peran pemerintah, akses, konten, interaksi, indikator pendukung dan penghambat. Jika faktor tersebut berjalan dengan baik, maka e-governance dinilai efektif.

a. Peran sistem (website) *E-planning*

Berdasarkan United Nations e-Government Survey 2008, website sebagai media pemerintah memiliki lima lapisan, dengan membagi fase pembangunan infrastruktur, pengiriman konten, bisnis, manajemen data, keamanan, dan manajemen pelanggan. pemerintahan.. Masing-masing dari website negara tentunya mengalami tantangan yang serupa ketika bergerak ke atas piramida, serta isu Amerika yang memenuhi tantangan kecepatan dimana mereka bergerak naik ke atas.

Indeks pengukuran website memberi informasi peringkat yang komparatif kepada setiap negara tentang kemampuan memberikan pelayanan online.



Gambar 3. Tahapan Perkembangan Website

(sumber: <https://123dok.com/>)

Tahapan Perkembangan E-Government, yaitu:

1. Tahap I - *Emerging* (Pemunculan):

Pada tahap pertama, sistem SIPD di Bappeda Kabupaten Tulungagung muncul dengan berbagai informasi pemerintahan. Ruang lingkup dari SIPD meliputi: Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, Informasi Pemerintahan Daerah. Setiap ruang lingkup memiliki informasi yang berbeda. Selain itu sudah mulai ada interaksi meskipun interaksi tersebut hanya antara pemerintah daerah dengan pemangku pemerintah lainnya. Sistem

ini dibuat langsung Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya untuk meningkatkan *E-Government* di ranah Bappeda kabupaten.

2. Tahap II - *Enhance* (Peningkatan):

Pada tahap kedua, sistem SIPD di Bappeda Kabupaten Tulungagung telah memberikan informasi pembangunan daerah yaitu data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, analisa dan profil pembangunan daerah serta informasi keuangan daerah. Namun masih ada beberapa ikon menu di dalam website yang belum bisa diakses. Website ini hanya bisa diakses oleh Bappeda, Pemerintah Desa/Kecamatan/Kabupaten sehingga masyarakat yang ingin melihat dan mengakses harus dengan persetujuan dari pemerintah desa/kecamatan/kabupaten sendiri.

3. Tahap III - *Interactive* (Interaktif):

Pada tahap ketiga, Bappeda Tulungagung hanya memberikan akses kepada desa/kecamatan/kabupaten untuk mendownload dan mengisi layanan yang ada dalam website SIPD. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bu Devi selaku Kepala Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa:

“Setiap perangkat daerah memiliki user atau hak akses masing-masing yang hanya dapat dibuka oleh perangkat daerah sendiri”. (sumber: wawancara pada 14 Januari 2022)

Untuk masyarakat yang ingin melihat kebijakan perencanaan pembangunan daerahnya perlu dengan dampingan dan arahan dari pemerintah daerahnya sendiri.

4. Tahap IV - *Transactional* (Transaksi):

Website SIPD Bappeda Kabupaten Tulungagung terdapat interaksi dua arah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Des/Kecamatan/Kabupaten. Untuk interaksi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sesuai dengan dampingan dari pemerintah setempat. Untuk masyarakat yang ingin melihat bagaimana perkembangan usulan pembangunan dari masyarakat, maka hasil perencanaan pembangunan yang disepakati oleh pemerintah daerah selanjutnya oleh pemerintah desa akan melakukan musyawarah kembali kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui usulan pembangunan apa saja yang disetujui. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bu Novi selaku Operator di Kantor Desa Gedangsewu yang menyatakan bahwa:

“Hasil Musrembang yang disetujui oleh Bappeda selanjutnya kita akan melakukan musyawarah kembali dengan warga desa untuk menginformasikan perencanaan apa saja yang

telah disetujui”. (sumber: wawancara pada 10 Juni 2022)

5. Tahap V - *Connected* (Koneksi):

Website SIPD Kabupaten Tulungagung mulai beralih fungsi menjadi badan yang terhubung dan merespon kebutuhan daerah akan perencanaan pembangunan daerah yang akan dikembangkan. Bagi Bappeda Kabupaten Tulungagung maupun perangkat pemerintahan daerah, SIPD lebih membantu pemerintah serta menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah. Sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan yang telah disepakati akan tepat sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa website SIPD Bappeda Kabupaten Tulungagung sudah dapat dikatakan efektif sebagai media dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun masih perlu pengembangan terkait dengan ikon yang terdapat di website yang belum semuanya dapat diakses.

b. Peran Bappeda dalam penggunaan dan pengelolaan website

Peran Bappeda dalam penggunaan dan pengelolaan website sebagai perantara informasi seperti informasi data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, analisa dan profil pembangunan daerah serta informasi mengenai keuangan daerah masing-masing yang nantinya akan dapat diakses secara langsung oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga Kemendagri sendiri dapat melihat perkembangan pembangunan yang ada di pemerintah daerah. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah kebijakan pembangunan daerah melalui pemerintah desa/kecamatan/kabupaten secara langsung.

Website digunakan oleh pemerintah daerah sebagai media untuk mengimplementasikan tujuan *e-government*. *E-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang dapat menghubungkan kepentingan masyarakat, bisnis, dan aktivitas lainnya.

Di Bappeda Kabupaten Tulungagung sendiri, Bappeda hanya berperan sebagai pengguna dan pengelola website daerah. Karena website SIPD hanya dapat diperbaharui oleh Kementerian Dalam Negeri selaku yang membuat sistem website tersebut. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Bu Devi selaku Kepala Bidang Literasi dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa:

“Dari Bappeda Kabupaten Tulungagung sendiri hanya sebagai pengguna dan pengelola website. Sedangkan yang dapat memperbaharui sistem tersebut hanya Kemendagri selaku yang membuat sistem website.” (sumber: wawawancara tanggal 14 Januari 2022)

Sehingga dapat dipahami bahwa peran Bappeda Kabupaten Tulungagung terhadap website adalah sebagai pengguna yaitu Bappeda Kabupaten Tulungagung berperan dalam penggunaan sistem website *E-Planning*, pengawasan yaitu Bappeda Kabupaten Tulungagung berperan dalam mengawasi penggunaan website *e-planning* yang dilakukan oleh perangkat daerah, serta sebagai perantara penghubung informasi pembangunan pemerintah daerah dan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung melalui Musrembang Kabupaten sehingga baik pemerintah desa/kecamatan/kabupaten dan masyarakat dapat mengetahui perkembangan pembangunan daerah.

c. Tujuan adanya sistem *E-Planning* SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah

Menurut Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah, tujuan SIPD adalah menyediakan layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung dan terintegrasi secara elektronik serta dapat diakses dari situs resmi Kementerian Dalam Negeri. Data dan informasi penataan ruang dikelola oleh data dan informasi penataan ruang yang didukung secara elektronik.

Selain itu, SIPD bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif an efisien berdasarkan atas prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan adanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien diharapkan perencanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Menurut Agus Fatoni selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sistem itu bisa digunakan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan daerah. SIPD dibuat untuk menyatukan data baik dari perencanaan, keuangan, sampai dengan pelaporan daerah seluruh Indonesia. Melalui SIPD, daerah tidak perlu menganggarkan biaya untuk membangun aplikasi atau sistem terkait perencanaan dan keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya SIPD, data seluruh Indonesia baik perencanaan pembangunan, musrenbang, tata kelola keuangan terintegrasi semuanya satu data.

Tujuan adanya SIPD di Bappeda Kabupaten Tulungagung dalam rencana pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah, tata kelola dan penilaian. Secara khusus bertujuan untuk menyempurnakan rencana pembangunan daerah dengan mendukung ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat,

terkini, dan mudah dipahami. SIPD sebagai alat untuk pengadministrasian rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan agar menjamin sasaran dan target tepat sasaran. Selain itu tidak membutuhkan waktu lama untuk mengakses website tersebut, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Sedangkan menurut Perangkat Daerah sendiri tujuan SIPD di Bappeda Kabupaten Tulungagung adalah menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat tentu akan lebih mudah mengetahui informasi pembangunan daerah seperti data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, serta analisa dan profil pembangunan daerah yang bisa diakses atas dampingan dari pemerintah daerah. Selain itu, adanya sistem SIPD bagi perangkat desa yaitu mempermudah dalam mengajukan usulan kegiatan ke Kabupaten sehingga tepat sasaran sesuai dengan tujuan kegiatan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bu Novi selaku operator Kantor Kepala Desa Gedangsewu yang menyatakan bahwa:

“Tujuan dari adanya sistem ini bagi desa yaitu dapat mempermudah desa dalam mengajukan usulan kegiatan ke Kabupaten sesuai dengan kamus SIPD” (sumber: wawancara tanggal 20 Juni 2022)

Sehingga dapat dipahami bahwa tujuan adanya SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung adalah peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah jangka panjang, menengah maupun tahunan agar tepat sasaran sesuai dengan target yang diinginkan. Selain itu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien. Bagi perangkat desa sendiri, website ini mempermudah desa dalam mengajukan usulan kegiatan ke kabupaten. Website dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh pemerintah daerah sehingga mempermudah untuk pengawasan dan pengecekan.

d. Jangkauan Akses sistem *E-Planning* atau SIPD

Jangkauan akses e-government untuk Bappeda di Kabupaten Tulungagung berkembang dengan baik dan lebih luas dibandingkan kota-kota besar lainnya, serta semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses website tersebut. Ada banyak tempat di mana kita dapat mengakses internet secara gratis, seperti taman alun-alun kota. Selain itu, website mulai dapat diakses dari mana saja melalui ponsel.

Menurut www.kompas.com, jangkauan akses e-government secara umum memiliki keragaman. Keragaman tersebut dipengaruhi beberapa faktor, meliputi:

1. Jumlah perangkat seperti laptop, telepon seluler, atau tablet yang digunakan untuk mengakses internet per orang. Hampir semua perangkat daerah Kabupaten Tulungagung sudah memiliki perangkat secara pribadi karena dipengaruhi oleh kegunaan serta kebutuhan akan perangkat komunikasi. Semua perangkat daerah Kabupaten Tulungagung telah menggunakan laptop, komputer serta HP yang mampu untuk mengakses.
2. Jumlah pengunjung pada lokasi yang dipilih.
3. Durasi waktu yang dihabiskan untuk mengakses situs website. Pengguna sistem SIPD khususnya Bappeda Tulungagung dan perangkat daerah rata-rata untuk mengunjungi website hanya menghabiskan waktu sekitar 5-10 menit tetapi semua tergantung dengan jaringan internet masing-masing pengguna. Jika jaringannya bagus akan lebih cepat dalam mengakses website.
4. Kunjungan ke Mitra pencarian jaringan display google ke alamat website www.sipdkemendagri.com.
5. Adanya spot yang dapat mengakses wireless. Bappeda Tulungagung telah memberikan dan memperluas spot-spot diberbagai titik untuk dapat mengakses wifi secara gratis seperti alun-alun dan area perkantoran pemerintah. Selain itu di desa-desa Kabupaten Tulungagung sudah menggunakan wifi untuk memperlancar dalam mengakses.

Dapat disimpulkan bahwa jangkauan akses *e-government* di Bappeda Kabupaten Tulungagung sangat beragam dan jangkauannya dipengaruhi faktor internal dari pemerintah sendiri mempengaruhi dalam jangkauan akses *e-government*. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh Bu Devi selaku Kepala Bidang Literasi dan Pengembangan Bappeda Tulungagung bahwa:

“Sekarang ini website sudah dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui HP maupun laptop. Apalagi untuk jangkauan wifi sudah dapat diakses di berbagai tempat spot-spot di pusat kota maupun desa-desa” (sumber: wawancara tanggal 14 Januari 2022)

Pemerintah Kabupaten Tulungagung sendiri sudah memberikan akses wifi gratis diberbagai spot baik di kota seperti alun-alun dan tempat umum lainnya maupun di desa-desa. Diharapkan dengan adanya akses wifi gratis perangkat daerah maupun masyarakat diberikan kemudahan untuk mengakses sistem website ini.

e. Content (Konten) dalam website *E-Planning* atau SIPD

Content adalah ide, topic, fakta dan pernyataan dalam suatu sumber informasi. Menurut (Gahrn,2005) *content* adalah apa yang harus disampaikan, bisa melalui: teks, gambar, suara, video, kata-kata yang diucapkan, matematika, bahasa symbol, kode morse,

music, bahasa tubuh, dan sebagainya. *Content* adalah suatu istilah yang menggambarkan informasi, khususnya dalam suatu konteks digital, bisa dalam bentuk halaman web, seperti informasi yang tersimpan dalam file, seperti: teks, gambar, suara dan video. Jadi dapat disimpulkan bahwa *content* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan materi atau informasi yang ingin disampaikan kepada public (dipublikasikan), yang bisa dipresentasikan melalui teks, gambar, suara, animasi, dan sebagainya. *Content* mengarah pada materi yang dilihat oleh viewer.

Content e-government yang terdapat di situs web menggambarkan citra otoritas. Situs web dengan desain yang menarik tidak cukup untuk situs web yang dibuat menjadi situs web yang lebih besar dengan ikon yang berfungsi paling baik. Untuk diperhatikan, harus didukung dengan konten yang jelas dan akurat. Selain itu, konten situs web harus diperbarui secara berkala untuk menjaga situs web dan konten aktual yang terkandung di dalamnya. Dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dinyatakan bahwa 1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah. 2) Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam SIPD.

Isi dalam website SIPD di Bappeda Kabupaten Tulungagung sudah berfungsi secara optimal. Ini dibuktikan dengan sudah mulai berfungsinya ikon-ikon dalam website SIPD. Tetapi website SIPD perlu pembaharuan secara berkala oleh Kemendagri untuk menghindari adanya eror dan berkembang dengan teknologi yang pesat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bu Devi selaku Kepala Bidang Literasi dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa:

“Semua ikon yang ada di dalam website sudah berfungsi secara optimal. Tetapi masih ada ikon yang belum dapat dibuka karena masih dalam proses pembaharuan.” (sumber: wawancara pada tanggal 14 Januari 2022).



Gambar 4. Halaman Awal SIPD

(sumber: <http://tulugagungkab.sipd.kemendagri.go.id/>)

Gambar 5. Empat Tipe Relasi Pada E-Government

f. Interaksi Bappeda dengan Perangkat pengguna sistem E-Planning atau SIPD

Interaksi adalah hubungan antara dua sistem yang terjadi sedemikian rupa sehingga apa yang terjadi dalam satu sistem mempengaruhi peristiwa yang terjadi di sistem lainnya. Menurut (Chaplin, 2011), interaksi adalah hubungan antar individu sedemikian rupa sehingga individu yang terpengaruh saling mempengaruhi.

Menurut Indrajit terdapat 4 (empat) macam interaksi antar pelaku dalam *e-government*, yaitu:

- G to C:** yaitu *Government to Citizen*, dimana terdapat interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah desa di Kabupaten Tulungagung selalu mengadakan Musrembang Desa dengan masyarakat desa dalam menentukan rencana pembangunan desa untuk satu tahun kedepan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bu Novi selaku sekretaris Desa Moyoketen yang menyatakan bahwa: “Sebelum kita merancang rencana pembangunan desa, kita selalu melakukan Musyawarah yang dimulai dengan musrembang dusun dan selanjutnya akan kembali dimusyawarkan melalui musrembang desa yang dilakukan di awal tahun.” (sumber: wawancara tanggal 10 Juni 2022)
- G to B:** yaitu *Government to Business*, dimana terdapat interaksi antara pemerintah dengan lingkungan bisnis (swasta).
- G to G:** yaitu *Government to Governments*, dimana terdapat interaksi antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lainnya. Bappeda Kabupaten Tulungagung terus melakukan komunikasi interaksi dengan perangkat daerah lainnya baik kabupaten, kecamatan maupun desa untuk memperlancar penggunaan sistem website ini.
- G to E:** yaitu *Government to Employees*, dimana terdapat interaksi antara pemerintah dengan karyawan. Kepala Bidang Literasi dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Tulungagung selalu melakukan komunikasi dengan staf bidang Litbang untuk memperlancar pengelolaan sistem website SIPD.



(Sumber: <http://muslimpoliticians.blogspot.com/>)

Pemerintah Bappeda Kabupaten Tulungagung telah melakukan interaksi komunikasi intensif dua arah dengan perangkat daerah lainnya baik kabupaten, kecamatan, maupun desa untuk memperlancar penggunaan sistem website di Kabupaten Tulungagung melalui sosialisasi setiap tahunnya untuk perangkat daerah pengguna sistem website SIPD.

Dapat disimpulkan bahwa interaksi *e-government* dalam website Bappeda Kabupaten Tulungagung sudah terjalin dengan baik melalui komunikasi dua arah Bappeda dengan pemerintah daerah. Bappeda Kabupaten Tulungagung telah menjalin komunikasi intens dua arah dengan pemerintah daerah sebagai pengguna sistem website. Untuk kedepannya baik Bappeda maupun pemerintah daerah lainnya dapat menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam penyampaian aspirasi kebijakan pembangunan. Sehingga diharapkan website ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi pasif tetapi diharapkan bisa bersifat dinamis sehingga terdapat timbal balik.

2. Faktor Pendukung Sistem *E-Planning*

Menurut (Notoatmodjo, 2003), faktor pendukung adalah faktor yang mendorong perilaku individu atau kelompok, termasuk keterampilan. Faktor-faktor ini termasuk prioritas dan kewajiban pemerintah dalam ketersediaan, keterjangkauan, sumber daya, dan pemberian layanan.

Faktor pendukung efektivitas sistem *E-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Kabupaten Tulungagung adalah semakin berkembangnya teknologi informasi yang pesat sehingga memudahkan mengakses internet, sarana dan prasarana yang sudah memadai seperti website dapat diakses dimanapun dan kapanpun misalnya melalui HP.



Gambar 6. Akses Website melalui HP

(Sumber : Dokumentasi Peneliti)

Selain itu Bappeda Kabupaten Tulungagung juga terus melakukan sosialisasi secara bertahap setiap tahun yang

dilaksanakan setiap akhir tahun untuk kepala perangkat daerah sehingga pengguna website dapat dengan mudah menggunakan website secara efektif. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bu Devi selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan bahwa :

“Kita terus memberikan sosialisasi bertahap setiap tahun kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan setiap akhir tahun yaitu bulan Desember sebagai upaya untuk mengembangkan keterampilan dan pengembangan website SIPD agar dapat digunakan dengan baik dan efektif oleh pemerintah daerah”.

(Sumber: wawancara pada 14 Januari 2022)

Bappeda Kabupaten Tulungagung juga terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna memperlancar penggunaan website. Bappeda Kabupaten Tulungagung sangat mendukung sistem ini karena lebih kompleks dan lebih membantu Bappeda dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta lebih terjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah.



Gambar 7. Sosialisasi Bappeda Tulungagung Kepada Pemerintah daerah

(Sumber : Dokumentasi Bappeda Tulungagung)

3. Faktor Penghambat sistem *E-Planning*

Faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu.

Faktor penghambat sistem *e-planning* di Bappeda Kabupaten Tulungagung yang pertama sistem SIPD masih sederhana karena sistemnya baru masih banyak yang bingung karena tingkatan usernya berbeda atau punya hak akses masing-masing. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bu Devi selaku Kepala Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa:

“Sistem SIPD ini masih sederhana karena sistem websitenya masih baru sehingga masih banyak yang bingung penggunaannya. Selain itu setiap perangkat daerah memiliki user yang berbeda-beda atau hak akses masing-masing setiap tahunnya sehingga hanya bidang yang mengelola dapat mengaksesnya”.

(Sumber: wawancara pada 14 Januari 2022)

Yang kedua, terkadang sistem eror saat memasukkan data perencanaan pembangunan karena biasanya saat memasukkan data sering di waktu yang bersamaan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bu Novi selaku bagian operator di Kantor Desa Gedangsewu yang menyatakan bahwa:

“Untuk kendala dari desa sendiri biasanya sistemnya sering eror karena saat memasukkan data bersamaan sehingga terkadang kita memasukkan hasil Musrembang saat tengah malah untuk menghindari adanya eror. Apalagi untuk memasukkan data terdapat batasan waktunya”. (sumber: wawancara pada 10 Juni 2022)

Selain itu sistem SIPD ini bukan dibuat langsung oleh Bappeda Kabupaten Tulungagung tetapi dibuat langsung oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga ketika terdapat eror harus segera mengkoordinasikan ke Kemendagri apalagi tidak selalu respon Kemendagri cepat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bu Devi selaku Kepala Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa:

“Untuk hambatannya dikarenakan sistem ini bukan dari kita sendiri, ketika ada eror kita kesulitan untuk koordinasi karena harus berkomunikasi secara langsung ke Kemendagri. Terkadang respon Kemendagri kurang karena mungkin banyaknya yang berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kemendagri”. (sumber: wawancara pada 14 Januari 2022).

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai efektivitas sistem *E-Planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Kabupaten Tulungagung, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Efektivitas Sistem E-Planning dalam perencanaan pembangunan daerah. Website sistem *E-Planning* atau SIPD di Bappeda Kabupaten Tulungagung sudah efektif sebagai media penyampaian informasi perencanaan pembangunan daerah yang meliputi informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang meliputi indikator efektivitas sistem website yaitu:
 - a) Peran sistem (website) *E-Planning* yang terdiri dari 5 tahapan perkembangan e-government yaitu Emerging, Enhance, Interactive, Transactional, Connected. website SIPD Bappeda Kabupaten Tulungagung sudah dapat dikatakan efektif sebagai media dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun masih perlu pengembangan terkait dengan ikon yang terdapat di website yang belum semuanya dapat diakses.
 - b) Peran Bappeda dalam penggunaan dan pengelolaan website. Peran Bappeda Kabupaten Tulungagung

terhadap website adalah menggunakan, pengawasan serta sebagai perantara penghubung informasi pembangunan pemerintah daerah dan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung.

- c) Tujuan adanya SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan SIPD di Bappeda Kabupaten Tulungagung adalah peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah jangka panjang, menengah maupun tahunan agar tepat sasaran.
 - d) Jangkauan akses sistem *E-Planning* atau SIPD. Banyaknya spot-spot internet dimana masyarakat bisa mengakses wifi secara gratis sehingga memudahkan dalam pengaksesan website.
 - e) *Content* dalam website *E-Planning* atau SIPD. Isi dalam website SIPD Kabupaten Tulungagung sudah berfungsi secara optimal tetapi masih perlu pembaharuan secara berkala.
 - f) Interaksi Bappeda dengan Perangkat pengguna sistem *E-Planning* atau SIPD. Bappeda Kabupaten Tulungagung telah menjalin komunikasi intens dua arah dengan pemerintah daerah sebagai pengguna sistem website.
2. Faktor pendukung yaitu semakin berkembangnya teknologi informasi yang pesat sehingga memudahkan mengakses internet, sarana dan prasarana yang sudah memadai, dan melakukan sosialisasi secara bertahap setiap tahun untuk kepala pemerintah daerah.
3. Faktor penghambat yaitu sistem SIPD yang masih sederhana, serta seringkali terjadi eror saat memasukkan data karena input data di waktu yang bersamaan, serta jika terdapat eror harus menghubungi langsung Kemendagri.

SARAN

Adapun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya:

- a. Bagi Bappeda Kabupaten Tulungagung
 - 1) Bappeda Kabupaten Tulungagung lebih optimal dalam mendengarkan aspirasi pemerintah daerah maupun masyarakat terkait dengan pembangunan daerah yang diajukan.
 - 2) Adanya sosialisasi yang lebih intensif untuk perangkat pemerintah daerah mengenai penggunaan website agar pemerintah daerah makin mengenal dan mempergunakan website secara maksimal.
 - 3) Bappeda Kabupaten Tulungagung terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya maupun kemendagri dalam penggunaan website.
 - 4) Bappeda Kabupaten Tulungagung terus berkomunikasi dengan Kemendagri mengenai pembaharuan berkala sistem SIPD.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian berikutnya dapat meneliti serta memperluas fokus penelitian yang tidak terbatas pada sistem *E-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah tetapi dengan lingkup yang lebih luas.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan artikel ilmiah ini diantaranya :

1. Para Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA
2. Eva Hany Fanida, S. AP., M.AP., selaku Dosen Pembimbing
3. Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP dan Galih Wahyu Pradana, A.A.P., M.Si selaku Dosen Penilai
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dan para staf bidang Litbang Bappeda Kabupaten Tulungagung
5. Dan pihak-pihak lainnya yang memberikan dukungan moral maupun materil kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, S., Wijaya, A., dan Suryadi, S. 2014. *Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)*. Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora, 17(3), 126–135. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2014.017.03.3>
- Febriani, A. L., Prabawati, I. 2021. *Analisis Penerapan E-Performance di Kota Surabaya*. Publika, 9(2), 13–24.
- Febrianti, Sintya D. 2022. *Inovasi Pelayanan Pajak Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi dan Pelayanan Pajak Daerah Terpadu Berbasis NIK (SIPANDAUNIK) di Kabupaten Ponorogo*. Jurnal Publika. 10(3). 739-752.
- Fidianingsih, V. dan Fanida, E. H. 2020. *Inovasi layanan e-SIM (Elektronik Surat Izin Mengemudi) Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo*. Publika, Vol. 8(5).
- Firmansyah, Winona I. 2022. *Efktivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada Masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang*. Jurnal Publika. 9(5). 261-272.
- Harahap, D. R., Badaruddin, B., Harahap, R. H. 2021. *Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan*. PERSPEKTIF, 10(1), 76–87. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4073>
- Hasan, M. A., Hasan, A., Gusnardi, Muda, I. 2019. *The government readiness for e-planning implementation to development planning in indonesia with budget availability as intervening variable*. International Journal of Scientific and Technology Research, 8(4), 174–179.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung .
- Negeri, K. D. 2019. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*.
- Panjaitan, V. 2021. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Repositori Ilmiah Nasional (Rin)*. JPSI. Vol 5 No 2 Hal 80-89.
- Rahmadani. 2020. *Pemanfaatan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan*.
- Rangga, S. D., Wulandari. 2020. *Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat*. XII(Desember), 13–30.
- Seyselis, M., dan Pradana, G. W. 2021. *Efektivitas Sistem Electronic Monitoring aan Evaluasi (E-Monev) di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya*. Publika, 37–48. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p37-48>
- Steiniger, S., dkk. 2016. *Planning with citizens: Implementation of an e-planning platform and analysis of research needs*. Urban Planning, 1(2), 49–64. <https://doi.org/10.17645/up.v1i2.607>
- Sukarno, Mohamad. 2020. “Implementasi Kebijakan E-Planning Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo”.
- Winarno, Kusnadi, A., dan Afriliana, N. 2019. *Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tangerang. Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2, 122–128. <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v2i0.500>